

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pandemi COVID-19 memberikan pengaruh yang cukup signifikan terhadap sektor pariwisata berupa penurunan kunjungan destinasi. Penurunan ini mengakibatkan beberapa daerah mengalami pengurangan pendapatan sebab adanya perlambatan dan pembatalan pada perjalanan domestik ke tempat wisata di berbagai daerah. Hal tersebut dikarenakan oleh adanya Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 mengenai pembatasan sosial berskala besar pada tempat umum tidak terkecuali penutupan tempat wisata. Kebijakan mengenai PSBB bertujuan untuk mengurangi penyebaran wabah pandemi ini sebab penyebaran wabah dapat berlangsung dengan cepat ditempat umum dan keramaian (Syafri & Hartati, 2020). Dilansir dari berita media massa pihak Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif telah membatasi mobilitas masyarakat untuk berkunjung ketempat wisata serta penutupan beberapa tempat wisata yang dinilai mampu memberikan ledakan pengunjung mengingat adanya penyalahgunaan *Work From Home* untuk bepergian ketempat-tempat wisata (Fauzan, 2020).

Adanya pengaruh pariwisata pada sektor perekonomian memerlukan upaya serta tindakan guna memperbaiki dan meningkatkan ketimpangan maupun penurunan dimasa Pandemi COVID-19 ini. Upaya yang diimplementasi pada tindakan ini juga tengah dilaksanakan oleh pihak Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif di Kecamatan Talisayan melalui gerakan BISA (Bersih, Indah, Sehat, dan Aman) yang ditujukan bagi pengembangan destinasi wisata di Kecamatan Talisayan agar kondisi wisata dapat terjaga secara fisik sehingga mampu menarik perhatian masyarakat luas wilayah agar berkunjung. Gerakan BISA yang terfokus

pada kualitas destinasi dan daya saing pariwisata memiliki sisi kebersihan, keindahan, kesehatan, dan keamanan pada sektor pariwisata juga dilatar belakangi untuk meningkatkan pendapatn masyarakat sekitar Kecamatan Talisayan melalui pemanfaatan lokasi sumber daya alam. Dengan dilaksanakannya gerakan ini maka akan memberikan pengaruh yang baik pada lingkungan wisata sehingga akan menambah kualitas destinasi mengingat buruknya infrastruktur dan minimnya sarana serta prasaran untuk menuju tempat wisata di Kecamatan Talisayan (Humas Pemkab Berau , 2020).

Diketahui bahwasannya Kecamatan Talisayan memiliki beberaoa destinasi wisata yang dapat dikembangkan untuk pertumbuhan ekonomi masyarakat, adapun beberapa destinasi tersebut ialah Pantai Talisayan, Pantai Asmara, Perairan Talisayan, Desa Dumaning, dan Danau Mahuang Uleg. Beberapa destinasi tersebut belum banyak dijamah oleh amsyarakat luar, sehingga hal tersebut yang menjadikan tantangan bagi pemerintah dan amsyarakat sekitar untuk memanfaatkan potensi tersebut untuk perekonomian daerah (Fauziah, 2022). Menurut Sunaryo (2013) pembenahan pada kepariwisataan sangatlah dibutuhkan guna meningkatkan kesejahteraan suatu daerah sebab melalui pariwisata masyarakat mampu mendapatkan taraf perekonomian yang layak.

Selaras dengan teori tersebut maka Pemerintah Kabupaten Berau bersama Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif meningkatkan kualitas destinasi wisata agar mencapai peningkatan pada sektor sosial dan perekonomian yang sempat menurun akibat minimnya infrastruktur serta sarana dan prasarana pariwisata di Kecamatan Talisayan yang mengakibatkan penurunan wisatawan dan tutupnya lapangan kerja disekitar wilayah pariwisata tersebut. Adapun tujuan dari penelitian ini ialah membahas dan memparkan tentang pemulihan dampak ekonomi dimasa Pandemi di Kecamatan Talisayan Kabupaten Berau yang

difokuskan pada pengembangan dan peningkatan pariwisata . Peneliti tertarik mengulas daerah tersebut sebab Kecamatan Talisayan sedang membangkitkan perekonomian yang sedang menurun akibat pandemi covid melalui peningkatan kualitas destinasi pariwisata.

Pemerintah di kecamatan talisayan sudah memberikan fasilitas yang cukup baik kepada parawisata yang datang ke lokasi untuk menggunakannya, dan pemerintah kecamatan talisayan selalu memperhatikan kualitas tempat parawisata, agar pengunjung lebih nyaman saat berlibur

1.2 Rumusan Masalah

Bagaimana upaya peningkatan kepariwisataan di Kawasan Talisayan, Kabupaten Berau Kalimantan Timur pasca Pandemi COVID-19 ?

1.3 Tujuan Penelitian

Mengetahui upaya upaya peningkatan kepariwisataan di Kawasan Talisayan, Kabupaten Berau Kalimantan Timur pasca Pandemi COVID-19.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Keunggulan teoritis dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana ilmu dan pengetahuan yang diperoleh dari materi perkuliahan dapat dikembangkan lebih lanjut, khususnya yang berkaitan dengan evaluasi kebijakan dan program pemerintah. Selain itu, pembaca dapat memperoleh wawasan mengenai destinasi wisata Talisayan melalui penelitian ini untuk meningkatkan penawaran wisata dan mengelola dampak sosial selama COVID-19.

1.4.2 Manfaat Praktis

Secara praktis, studi ini bermanfaat karena dapat memberikan informasi kepada pemerintah daerah lainnya tentang bagaimana langkah-langkah serupa dapat diambil untuk mengurangi dampak sosial dan ekonomi dari pandemi COVID-19, dan untuk memberikan bukti nyata mengenai upaya pemerintah dalam menerapkan dan melaksanakannya. Selesai diimplementasikan Kebijakan dan program diciptakan melalui gerakan.

1.5 Studi Terdahulu

Judul Penelitian	Penulis	Isi	Temuan Riset
Faktor Pengaruh Pola Pergerakan Wisatawan di Kota dan Kabupaten Tegal. Industrial Research Worshop and Seminar Nasional.	(Sofi & Susilowati, 2017)	Kondisi fisik serta non fisik pada ddestinasi pariwisata cukup memberikan dampak terhadap pola pergerakan wisatawan untuk berkunjung. Dalam penelitian ini, peneliti juga menjelaskan tentang bentuk medan, jarak antar objek wisata, aksesibilitas, dan fasilitas objek wisata. Terdapat pula tipe wisatawan yang mengunjungi wisata berupa bentuk medan yang berbeda seperti dataran rendah dan dataran tinggi.	Pada penelitian ini belum menjelaskan mengenai sarana dan prasarana objek wisata serta belum adanya perbaikan dan kemudahan akses. Hal terpenting dalam penelitian ini yang belum dijelaskan ialah tentang promosi objek wisata.
Dampak Sosial dan Ekonomi dan Budaya Objek Wisata Sungai Hijau Terhadap Masyarakat di	(Rahmah, 2017)	Penelitian ini menjelaskan tentang pengaruh objek wisata terhadap kehidupan masyarakat berupa	Temuan riset pada penelitian ini ialah belum adanya

<p>Desa Salo Kecamatan Salo Kabupaten Kampar.</p>		<p>lapangan pekerjaan sehingga mengurangi tingkat pengangguran. Sedangkan dampak sosial yang ditemukan ialah adanya penemuan jati diri bagi masyarakat terhadap dampak yang ditimbulkan dari dampak perekonomian dari objek wisata yang ada.</p>	<p>pengawasan oleh pemerintah terkait destinasi wisata sehingga masih terdapat masyarakat yang berorilaku semaunya.</p>
<p>Strategi Komunikasi Pemerintah Kabupaten Subang Menyosialisasikan Gerakan Pembangunan untuk Rakyat Infrastruktur Berkelanjutan. Jurnal Kajian Komunkasi, Vol. 5. No.2. Hal. 36-146</p>	<p>(Rahman & Sjoraida, 2017)</p>	<p>Penelitian ini membahas tentang afektivitas dari suatu gerakan yang dibentuk oleh pemerintah begi kesejahteraan masyarakat. Akan tetapi peneliti lebih memfokuskan penelitiannya terhadap strategi komunikasi yang dilaksanakan oleh pemerintah sehingga dapat dilaraskan dengan tujuan dan sasaran dari gerakan yang dibentuk dan dilaksanakan tersebut.</p>	<p>Pembaca menemukan hal pening yang terdapat pada penelitian ini, yakni adanya kepentingan untuk melakukan pembangunan infrastruktur. Pemerintah pun telah melakukan komunikasi mengenai pembangunan infastruktur, akan tetapi hal tersebut belum mempengaruhi kesadaran masyarakat secara signifikan. Penelitian di masa depan mengharuskan peneliti untuk mendiskusikan dan menjelaskan pentingnya gerakan bagi masyarakat dengan menyampaikan informasi dan kepentingan secara jelas, sehingga mengubah persepsi</p>

			masyarakat terhadap gerakan dan meningkatkan kepercayaan diri individu.
Dampak Pandemi COVID-19 Terhadap Pariwisata Sumatera Barat. Jurnal Pembangunan Nagari, Vol. 5, No.2. 148-164.	(Masbiran, 2020)	Penelitian ini membahas mengenai dampak yang ditimbulkan dari Pandemi COVID-19 terhadap sektor pariwisata di Sumatera Barat. Peneliti pun menjelaskan jika hasil penelitian ini ialah adanya pengurangan jumlah kunjungan, penurunan pencapaian pada sektor transportasi dan usaha yang terdapat di beberapa tempat wisata. Dalam hal ini peneliti menjelaskan pula jika pemerintah memiliki peran sebagai stakeholder yang bertanggungjawab untuk mengatasi redupnya sektor pariwisata dan perekonomian provinsi tersebut melalui mitigasi kepariwisataannya.	Temuan riset dalam penelitian ini ialah adanya dampak buruk yang dipengaruhi dari adanya Pandemi COVID-19 berupa penurunan disegala bidang, oleh karena itu peneliti menjelaskan jika pemerintah setempat melakukan mitigasi kepariwisataan. Akan tetapi menurut pembaca dapat diketahui jika peneliti belum menjelaskan hasil dari mitigasi kepariwisataan tersebut serta stakeholder atau instansi apa saja yang berperan. Oleh karena itu pada penelitian selanjutnya, penelitian pembaca akan membentuk penelitian yang menjelaskan tentang hasil dari mitigasi kepariwisataan beserta stakeholder berupa instansi yang berperan.
Implementasi Kebijakan Pemerintah dalam Melaksanakan Program	(Sunarti, 2017)	Dalam penelitian ini, peneliti menjelaskan tentang program pembangunan yang	Temuan riset yang etrdapat pada penelitian ini ialah tentang kebijakan pemerintah

<p>Pembangunan. MODERAT : Jurnal Ilmu Pemerintahan. Vol. 2 No.2.</p>		<p>dilaksanakan oleh pemerintah haruslah sesuai dengan kebijakan yang sebelumnya dibentuk. Hal ini bertujuan agar pelaksanaan program memiliki kesesuaian antara tujuan dan sasaran.</p>	<p>yang akan diimplementasikan terhadap suatu program pembangunan dengan menyertakann stakeholder yang sesuai terkait program yang akan dibentuk. Penelitian ini hanya terfokus pada satu topic namun belum menjelaskan secara jelas dan gamblang mengenai tahapan pelaksanaan kebijakan yang dilaksanakn oleh pemerintah melalui program pembangunan yang dibentuk serta belum adanya fokus pembangunan yang akan dikelola.</p>
<p>Pengetahuan dan Sikap Mahasiswa Kesehatan tentang Pencegahan Covid-19 di Indonesia. Jurnal Ilmu Keperawatan dan Kebidanan. Vol. 11. No.2</p>	<p>(Sukaesih , Usman , Budi, & Adkhana, 2020)</p>	<p>Informasi mengenai pandemi ini harus terus menerus dan komprehensif dikomunikasikan kepada seluruh lapisan masyarakat Indonesia, khususnya pelajar. Menurut peneliti, pengetahuan dan sikap mahasiswa mengenai pengobatan dan pencegahan epidemi Covid-19 dapat menjadi contoh bagi masyarakat yang belum merespons permasalahan kesehatan negara</p>	<p>Permasalahan dalam penelitian ini tidak terlalu spesifik karena tidak menjelaskan mengapa pedoman ini tidak dilaksanakan dengan baik. Penulis biasanya membahas ketidakmampuan masyarakat dalam mengimplementasikan</p>

		<p>yang semakin memburuk. Oleh karena itu, untuk mencegah penyebaran virus tersebut, para pelajar diminta turut serta mengedukasi masyarakat akan pentingnya kebersihan, penjarakan sosial, dan tidak berkerumun di masa pandemi seperti ini. Penting untuk diingat bahwa pelajar merupakan kelompok terpelajar yang dapat menjadi teladan bagi masyarakat lainnya yang masih minim informasi mengenai Covid-19.</p>	<p>kebijakan. Oleh karena itu, penelitian yang dibahas para ilmuwan tentang pelaksanaan pengendalian COVID-9 didasarkan pada apakah memenuhi maksud dan tujuan atau tidak sama sekali.</p>
<p>Efektifitas Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Masa Pandemi Corona Virus 2019 oleh Pemerintah sesuai Alamat UUD NRI 1945. Administrative Law & Governance Journal, Vol. 3. No.2</p>	<p>(Ristyawati, 2020)</p>	<p>Kebijakan pembatasan sosial secara luas mungkin tidak efektif karena sebagian masih berpendapat bahwa PSBB tidak termasuk dalam UUD 1945. Latar belakang lain yang membuat masyarakat tidak mengikuti PSBB adalah semakin meningkatnya kebutuhan yang tidak dapat dipenuhi di</p>	<p>Jika dicermati lebih dekat, permasalahan dalam penelitian ini tidak terlalu spesifik karena tidak menjelaskan mengapa kebijakan tersebut tidak dilaksanakan dengan baik. Penulis biasanya membahas ketidakmampuan masyarakat dalam mengimplementasikan kebijakan. Oleh karena itu, kajian yang dibahas para ilmuwan mengenai pelaksanaan pengendalian COVID-9 adalah apakah</p>

		<p>masyarakat, terutama di masa krisis seperti ini. Oleh karena itu, pemerintah mengeluarkan pernyataan tentang penciptaan lingkungan sosial yang kondusif, menjelaskan transparansi informasi terkait pandemi Covid-19 dan penanggulangannya di berbagai bidang. Hal ini dapat dicapai dengan mengikuti praktik-praktik sehat seperti menjaga jarak sosial, sering mencuci tangan, menggunakan masker dan pembersih tangan. Selain itu, pemerintah memberikan dukungan moril dan materil kepada masyarakat untuk mengatasi pandemi, khususnya masyarakat menengah ke bawah.</p>	<p>memenuhi maksud dan tujuan atau tidak sama sekali.</p>
<p>Konstitusionalitas Pemerintah Daerah dalam Menetapkan Kebijakan Lockdown pada Penanganan Covid-19.</p>	<p>(Wadi, 2020)</p>	<p>Konstitusionalitas kebijakan lockdown Covid-19 merupakan pelaksanaan otonomi daerah dalam perspektif konstitusional</p>	<p>Sesuai dengan konstitusi, penelitian ini membahas dan menjelaskan instruksi pemerintah daerah mengenai penanganan pandemi COVID-19. Kurangnya bukti</p>

<p>SALAM : Jurnal Sosial & Budaya Syar'i. Vol. 7. No.7</p>		<p>sesuai dengan pedoman sebelumnya Undang-Undang Kekeparantinaan Kesehatan Nomor 6 Tahun 2018 untuk menangani wabah atau penyakit menular. Kondisi kritis ini muncul di masa pandemi Covid-19. Pemerintahan negara bagian dan daerah menyelesaikan permasalahan masyarakat karena mempunyai kewenangan dan tanggung jawab hukum.</p>	<p>dari pembaca mengenai penerapan penutupan pemerintah daerah disebabkan karena mereka kurang memberikan penjelasan kepada kota-kota yang tidak menerapkannya, dibandingkan menjelaskan atau membenarkannya. kota-kota yang tidak untuk melamar kunci , meninggalkan kesan yang kurang valid bagi masyarakat yang menerapkannya..</p>
<p>Force Majeure dan Notoir Feiten atas Kebijakan PSBB Covid-19. Jurnal Hukum Sasana, Vol. 6. No.1</p>	<p>(Sulfarina & Wahyuni , 2020)</p>	<p>Pemberlakuan PSBB pada masa pandemi Covid-19 diatur dalam PP Nomor 21 Tahun 2020. Berdasarkan kebijakan tersebut, PSBB merupakan upaya yang mampu mengendalikan pemberantasan virus yang menyebar secara cepat dan masif. Meski dinilai efektif, peneliti dalam jurnal ini juga menjelaskan bahwa penerapan PSBB juga menimbulkan dampak negatif, yakni mengganggu</p>	<p>Meski penelitian ini menjelaskan pentingnya penutupan di masa pandemi COVID, namun peneliti penelitian ini tidak menjelaskan upaya atau langkah yang harus dilakukan pemerintah untuk mengatasi dampak PSBB di wilayahnya. Pada kajian berikutnya yang akan mereka lakukan, mereka akan menambahkan bagaimana cara mengatasi dampak penutupan, khususnya pada sektor sosial dan ekonomi.</p>

		<p>aktivitas perekonomian masyarakat di Indonesia. Melalui keputusan ini, pemerintah juga harus menyikapi dampaknya dan mengambil langkah lain untuk mengurangi kesenjangan ekonomi di berbagai wilayah di Indonesia. Peneliti menilai PSBB ini berisiko karena menimbulkan permasalahan baru dalam kehidupan masyarakat di semua lapisan masyarakat, baik menengah atas maupun bawah..</p>	
--	--	---	--

Berdasarkan studi terdahulu yang telah dicantumkan oleh peneliti maka dapat diketahui dari beberapa penelitian terdahulu telah membahas mengenai pengaruh destinasi wisata terhadap perkembangan masyarakat serta adanya pembahasan mengenai kebijakan pemerintah berupa penanganan dampak pandemi. Namun dari beberapa penelitian yang peneliti cantumkan pada studi terdahulu belum adanya kejelasan secara validitas mengenai hasil peningkatan atau penurunan dari pelaksanaan kebijakan penanganan dampak Pandemi COVID-19 tersebut khususnya pada sektor wisata. Oleh karena itu dengan adanya penelitian ini, peneliti hendak melengkapi terkait upaya dalam peningkatan wisata di Kawasan Talisayan pasca Pandemi COVID-19.

1.6 Kerangka Teori

1.6.1 Kebijakan Publik

Pada dasarnya konsep kebijakan publik merupakan suatu tindakan yang dilakukan pemerintah sebagai alternatif pengelolaan lingkungan hidup, mengatasi, mencegah dan menyelesaikan permasalahan yang ada pada suatu negara atau wilayah untuk menyelesaikan permasalahan tersebut (Kambey, 2017). Kebijakan publik dapat dikonkretkan sebagai suatu pilihan diantara beberapa alternatif untuk mencapai tujuan yang didorong oleh kepentingan masyarakat sehingga memerlukan pilihan-pilihan untuk mencapai hasil Solusi (Tachjan, 2008). Menurut Iskandar (2012), Pengambilan kebijakan publik berupa rencana program, pelaksanaan program melalui tindakan dan kegiatan, keputusan masa lalu dan sikap dalam implementasi kebijakan.

Dalam keadaan tertentu, kebijakan publik mencakup beberapa unsur penting, seperti: minat. dari kebijakan publik secara umum. Konteks kebijakan publik ini menjelaskan sifat tindakan pemerintah untuk mewujudkan kelangsungan hidup masyarakat sesuai dengan cita-cita bersama (Islamy, 1994). Hal ini di setujui pula oleh Winarno (2002) Klasifikasi kebijakan publik terbagi dalam dua kategori, yaitu tindakan pemerintah dalam kebijakan dan proses penyelesaian masalah melalui formulasi, implementasi, dan evaluasi.

Keberadaan kebijakan publik juga dapat dijadikan landasan bagi program-program yang dikembangkan oleh pejabat untuk mengembangkan dan memperbaiki kesenjangan sosial. Program pemerintah merupakan suatu rencana yang diikuti dengan tindakan-tindakan pendukung berdasarkan kebijakan publik yang telah ditentukan (Aristora, 2019). Peran kebijakan publik dalam pengembangan program adalah memperkuat struktur program agar dapat berfungsi sesuai karakteristiknya, yaitu: peraturan, ekstraktif, organisasional dan desentralisasi (Dye, 2005). Oleh karena itu, program tersebut dapat berjalan dengan baik apabila kebijakan publik disikapi dengan baik sebagai suatu kegiatan pemerintah yang serius.

Disisi lain, Agustino (2008) menjelaskan ciri-ciri pokok kebijakan umum, yang memuat unsur-unsur aktif dari seluruh keputusan individu mengenai keseriusan pemerintah dalam melaksanakan kegiatan, baik positif maupun negatif. Tindakan masyarakat yang positif dan negatif dapat diperoleh dengan membandingkan antara keputusan dan tindakan. Dikatakan positif jika pemerintah dapat memutuskan tindakan dan tindakan yang tepat. Namun, ada sisi

negatifnya ketika keputusan tidak sesuai dengan tindakan sebenarnya. Dalam melaksanakan kebijakan publik, pelaksanaannya berpedoman pada beberapa hal, yakni (Solichin, 2008) :

1. Kebijakan harus dibedakan dari keputusannya
2. Tidak semua kebijakan dibedakan dari administrasinya
3. Kebijakan mencakup harapan dan perilaku
4. Kebijakan memiliki hasil akhir yang ingin dicapai
5. Kebijakan memiliki tujuan tertentu yang tertera secara eksplisit maupun implisit
6. Kebijakan diruluskan secara subjektif

1.6.2 Indikator Kebijakan Publik

Harold Lasswell berpendapat bahwa indikator-indikator tersebut tidak terbatas pada satu pengukuran saja, melainkan mencakup beberapa hal (Syafiie, 1992) :

1. Keputusan yang jelas terkait tujuan dan sasaran dari kebijakan.
2. Kecenderungan atas isu atau permasalahan yang menjadi pusat perhatian pemerintah sehingga memerlukan kebijakan publik.
3. Kondisi dari lingkungan masyarakat saat isu publik tersebut muncul
4. Proyeksi keadaan kedepannya setelah adanya kebijakan publik tersebut muncul.
5. Hasil yang di berikan dari berlangsungnya kebijakan publik tersebut.

Sementara itu, menurut Howlett dan Ramesh (1995), tahapan pengambilan keputusan publik juga dapat dijadikan standar kelayakan, yang terdiri atas:

1. Penyusunan agenda

Pada tahap ini pemerintah harus mampu menarik perhatian masyarakat terhadap suatu kebijakan terhadap suatu permasalahan publik, sehingga dapat membantu pemerintah kedepannya dalam merencanakan dan melaksanakan kebijakan publik pada tahap pertama.

2. Formulasi terhadap kebijakan

Pada titik ini, tidak semua urusan publik menjadi kebijakan pemerintah. Pasalnya, pemerintah perlu memperjelas topik mana saja yang bisa dimasukkan dalam kebijakan publik.

3. Pembentukan kebijakan

Pengambilan keputusan politik juga merupakan suatu proses dimana pemerintah menjalankan fungsinya sebagai pengambil keputusan dan organisator. Pada titik ini, masyarakat justru mempertimbangkan standar pemerintah dalam mengambil keputusan, sehingga menimbulkan interpretasi apakah sesuai atau tidak dengan kondisi masyarakat.

4. Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan adalah pelaksanaan kebijakan yang dirumuskan sesuai standar dan kebutuhan kinerja, yang kemudian berpedoman pada evaluasi kebijakan.

1.6.3 Peningkatan Kualitas Destinasi Pariwisata

1.6.3.1 Pengertian Peningkatan Kualitas Destinasi Pariwisata

Peningkatan pariwisata merupakan langkah yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan yang telah ditetapkan. Tempat dan Tempat Wisata, syarat suatu daerah tujuan wisata adalah sesuatu yang dapat dilihat, dilakukan dan dibeli. Terdapat tiga jenis pengembangan sarana dan prasarana: layanan inti pariwisata dan penawaran pendukung pariwisata. Tujuan peningkatan pariwisata adalah untuk memajukan pariwisata dan mengembangkan ke arah yang lebih baik dalam kualitas pelayanan dan prasarana, memperlancar akses ke segala tempat, menjadi daerah tujuan wisata yang diinginkan dan menciptakan manfaat ekonomi yang baik bagi masyarakat sekitar (Saleh, 2018).

Dalam Rani (2014) Tujuan lain dari peningkatan pariwisata adalah untuk menciptakan kekayaan bagi masyarakat pesisir dan meningkatkan standar hidup yang lebih baik dan adil. Penyebab rendahnya taraf hidup masyarakat adalah pengaruh kehidupan sosial yang menyebabkan terjadinya ketimpangan, sehingga kesejahteraan masyarakat tidak meningkat secara signifikan. Peningkatan pariwisata suatu destinasi selalu memperhatikan manfaat dan keunggulan masyarakat sekitar. Perluasan pariwisata harus direncanakan

secara matang sehingga dapat memberikan manfaat bagi masyarakat secara ekonomi, sosial dan budaya. Peningkatan pariwisata adalah pengembangan atau perbaikan daerah tujuan wisata agar menjadi lebih baik dan menarik dari segi tempat dan objek yang dikandungnya, sehingga dapat dikunjungi kembali oleh wisatawan (Riyanto & Primadany, 2018).

1.6.3.2 Indikator Peningkatan Kualitas Destinasi Pariwisata

Menurut Sunaryo (2013) terdapat beberapa komponen yang dapat dijadikan sebagai tolok ukur atau indikator dari peningkatan kualitas destinasi dalam pariwisata, yakni :

1. Objek dan daya Tarik

Daya tarik yang berbasis utama pada kekayaan alam, budaya, maupun buatan. Kegiatan-kegiatan yang dimaksud dapat berupa semua hal yang berhubungan daerah dan kegiatan-kegiatan lain yang berhubungan dengan kegiatan wisata yang menarik wisatawan untuk mengunjungi sebuah objek wisata.

2. Aksesibilitas

Dukungan sistem transportasi yang meliputi rute atau jalur transportasi, fasilitas terminal, bandara, pelabuhan, dan lainnya.

3. Amenitas

Ketersediaan fasilitas pendukung yang digunakan oleh wisatawan yang mencakup fasilitas penunjang dan pendukung wisata yang meliputi akomodasi, rumah makan, toko cinderamata, biro perjalanan dan lainnya.

4. Kelembagaan

Keberadaan dan peran stakeholder unsur dalam mendukung terlaksananya kegiatan pariwisata termasuk masyarakat sebagai tuan rumah.

1.6.4 Penanganan Dampak Pandemi COVID-19

1.6.4.1 Pengertian Penanganan Dampak Pandemi COVID-19

Penanggulangan wabah Covid-19 merupakan upaya pengendalian dan penanggulangan permasalahan pertahanan negara terkait penyakit menular sebagai masalah sosial dan kesehatan yang memerlukan perhatian dan tindakan khusus dalam penanganannya. Pandemi Covid-19 telah menciptakan situasi kritis karena dapat menyebar melalui udara dan kontak manusia dan jika tidak ditangani dengan baik dapat menyebar seiring berjalannya waktu (Rizal, 2020). Pemberantasan pandemi bertujuan untuk mencegah atau mengurangi jumlah korban epidemi virus dan memperbaiki kondisi lingkungan dan kesehatan masyarakat. Penyebab wabah Covid-19 berasal dari wilayah Tiongkok yaitu Wuhan dan ditularkan oleh hewan yang biasanya tidak dimakan manusia, yang kemudian menyebabkan infeksi virus dan berdampak pada kesehatan masyarakat setempat. Penyakit tersebut memiliki gejala seperti halnya (Karyono , Rohadin , & Indriyani , 2020) :

1. Batuk berlebihan
2. Ketergangguannya sistem pernafasan dan pencernaan
3. Letih dan lesu
4. Menurunnya nafsu makan
5. Demam berkepanjangan

Wabah ini tergolong bencana non-alam karena dampaknya yang lebih besar terhadap masyarakat dan kesehatan masyarakat. Penanggulangan bencana epidemi ini dapat

bervariasi mulai dari penetapan keadaan darurat regional untuk kondisi yang mengancam keselamatan atau kesehatan masyarakat, pencegahan penyebaran epidemi, pengobatan korban epidemi, dan pendidikan komunitas lainnya. mendorong masyarakat untuk mandiri.

- mengisolasi dan melakukan perbaikan di bidang kesehatan melalui protokol atau pedoman yang bertujuan untuk mencegah penyebaran epidemi virus lebih lanjut, serta meningkatkan sektor sosial dan ekonomi, karena tidak dapat disangkal bahwa sebagian orang kehilangan pekerjaan dan aktivitas sosial karena ini. terhadap penyebaran epidemi.

BNBP ditunjuk oleh pemerintah pusat sebagai koordinator utama pengendalian penyakit yang dapat melakukan operasi dan evakuasi dalam segala situasi dimana masih terjadi pandemi virus Covid-19. Dalam wilayah perkotaan. sesuai dengan standar fungsional yang berlaku di wilayah tersebut (Wibowo, 2020). Setiap daerah mempunyai mekanisme berbeda dalam menangani bencana epidemi. Sebab, cara penyebaran virus di suatu daerah berbeda-beda sehingga tidak bisa dibandingkan secara keseluruhan. Dalam hal ini otonomi daerah juga ikut serta dalam penanggulangan wabah bencana Covid-19. Selain itu, komunikasi yang stabil antar organisasi regional untuk mengoordinasikan seluruh aktor non-pemerintah, baik swasta maupun publik, sangat penting dalam manajemen wabah (Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, 2019).

1.6.4.2 Indikator Penanganan Dampak Pandemi COVID-19

Penetapan indikator pengendalian epidemi Covid-19 dapat menjadi acuan pemerintah dalam menangani wabah virus ini dan memprediksi penyebarannya. Berikut adalah petunjuk untuk mengendalikan epidemi Covid-19 (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2020) :

1. Kriteria Epidemiologi

Kriteria epidemiologi merupakan indikator atau ukuran pengendalian epidemi Covid-19 yang memberikan penilaian terhadap keberhasilan pemerintah dan pihak lain dalam mencegah dan mengendalikan pandemi Covid-19.

2. Kriteria Sistem Kesehatan

Kriteria ini mengharuskan fasilitas kesehatan menunjukkan kemampuannya dalam menentukan status, status, dan penyebaran epidemi di masyarakat serta memberikan perawatan yang tepat kepada pasien yang dinyatakan positif Covid-19.

3. Kriteria Surveilans terhadap Kondisi Masyarakat

Surveilans merupakan kemampuan pemerintah dan tim medis untuk mengetahui jumlah korban atau pasien epidemi Covid-19, serta mengatasi kesenjangan sosial melalui perbaikan berbasis surveilans, yang kemudian dijadikan bahan evaluasi.

Berdasarkan ketiga indikator tersebut di atas, pemerintah menjadi teladan dalam pengorganisasian, pelaksanaan, dan reformasi. pendapat. Sebab, menghadapi bencana non alam juga diwujudkan dalam tanggung jawab, profesionalisme, dan tanggung jawab aparat terhadap kekurangan dan permasalahan masyarakat di masyarakat.

1.7 Definisi Konseptual

1.7.1 Kebijakan Publik

Kebijakan publik adalah seperangkat aturan yang diikuti oleh pejabat sebagai langkah alternatif menuju lingkungan yang terkendali ketika mereka merespons, mengantisipasi, dan memecahkan masalah di suatu negara atau wilayah, seperti: B. menyelesaikan masalah yang disebabkan oleh keputusan, manajemen, harapan, dan perilaku. Hasil akhir yang ingin dicapai dan tujuan tertentu yang dinyatakan secara langsung atau tidak langsung.

1.7.2 Peningkatan Kualitas Destinasi Pariwisata

Peningkatan pariwisata merupakan langkah yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan pembangunan yang telah ditetapkan terhadap destinasi dan daya tarik wisata, untuk memajukan pariwisata dan mengembangkannya ke arah yang lebih baik dari segi kualitas pelayanan dan infrastruktur, serta memperlancar akses kemanapun. menjadi tujuan wisata populer dan memberikan manfaat ekonomi yang baik bagi masyarakat sekitar.

1.7.3 Penanganan dampak Pandemi COVID-19

Pengendalian epidemi berarti segala upaya yang dilakukan negara atau organisasi lain untuk mengatasi masalah kesehatan dan memberikan pedoman pencegahan penyakit di lingkungan dan masyarakat. Selain dari segi pelayanan kesehatan, pengendalian epidemi dapat dilakukan dari aspek lain yaitu dari segi sosial dan ekonomi.

1.8 Definisi Oprasional

Variabel	Indikator	Parameter
Peningkatan Kualitas Pariwisata	Objek dan daya tarik wisata	1. Sumber daya alam 2. Kegiatan wisata
	Akseibilitas	1. Jalur Transportasi 2. Transportsi
	Amenitas	1. Failitas penunjang 2. Pendukung Pariwisata
	Kelembagaan	1. Peran stakeholder 2. Peran masyarakat.

1.9 Metode Penelitian

1.9.1 Jenis Penelitian

Proposal penelitian ini mengandalkan penelitian kualitatif yang pendekatannya bersifat deskriptif, yaitu mendeskripsikan ciri-ciri dan peristiwa-peristiwa yang berkaitan dengan evolusi hubungan antarmanusia sekaligus menyelidiki dimensi sosial masyarakat (Surachmad, 1982). Metode ini bercirikan fokus pada penataan masalah penulisan. Data dikumpulkan secara sistematis, diuraikan dan dianalisis secara intensif dan rinci (Nurmandi & Purnomo, 2011). Keunggulan analisis kualitatif adalah kemampuannya memahami, menafsirkan dan mendefinisikan hubungan komparatif antara fenomena sosial yang terkait (Martono, 2011).

1.9.2 Lokasi Penelitian

Peneliti melakukan penelitian ini pada Kantor Pengelola Wisata di Kawasan Talisayan serta melakukan survey langsung di beberapa tempat dan jasa wisata di Kawasan Talisayan guna mempermudah peneliti dalam mendapatkan data dan wawancara dalam penelitian ini. Alasan peneliti memilih lokasi tersebut sebagai lokasi penelitian dikarenakan peneliti ingin mengetahui seberapa jauh upaya peningkatan kepariwisataan di Kawasan Talisayan, Kab. Berau, Kalimantan Timur.

1.9.3 Sumber Data

1.9.3.1 Data Primer

Penulis menggunakan data primer yang di dapatkan melalui hasil wawancara di kantor Dinas Pariwisata Kabupaten Berau, Kantor Kecamatan Talisayan, dan masyarakat setempat agar penulis mendapatkan data akurat mengenai peningkatan kualitas kawasan wisata Talisayan untuk meningkatkan kondisi masyarakat pasca Pandemi COVID-19.

1.9.3.2 Data Sekunder

Pada penelitian ini menggunakan penelitian terdahulu seperti berita online, jurnal dan prosiding seminar nasional mengenai kebijakan pemerintah dalam penanganan dampak Pandemi COVID melalui pemanfaatan dan pelaksanaan dari suatu program.

1.9.4 Teknik Pengumpulan Data

1.9.4.1 Wawancara

Wawancara penting dalam penelitian kualitatif karena wawancara melihat informasi yang telah diubah menjadi kata-kata. Wawancara adalah percakapan dengan tujuan tertentu antara dua pihak, yaitu pewawancara (interviewer) sebagai penanya dan terwawancara (narasumber) sebagai penjawab pertanyaan (Putra, 2018). Adapun dalam tahap wawancara, narasumber yang peneliti pilih antara lain sebagai berikut :

- a. Lembaga Pengelola Kawasan Wisata Talisayan, berjumlah 20 orang
- b. Kepala Kantor Kecamatan Talisayan
- c. Masyarakat Kawasan Wisata Talisayan berjumlah 60 orang

1.9.4.2 Observasi

Peneliti melakukan kedatangan langsung ke beberapa daerah di Kawasan Talisayan untuk mendapatkan fakta dan data secara langsung terkait upaya peningkatan kualitas wisata pasca Pandemi COVID-19.

1.9.4.3 Studi Dokumentasi

Penelitian dokumenter dilakukan dengan cara melihat misalnya dokumen, catatan, pesan, file atau informasi lain yang didokumentasikan sedemikian rupa sehingga memuat fakta dan informasi yang diperoleh dari wawancara atau media lainnya (Djaelani, 2013). Penelitian

dokumenter yang dilakukan peneliti didasarkan pada informasi tertulis yang diberikan oleh Kantor Wilayah Talisayan untuk mendukung penelitian ini.

1.9.5 Teknik Analisis Data

Menurut Hadi (1986), teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian kualitatif dapat diterapkan melalui wawancara, survei, dan tinjauan literatur penelitian-penelitian sebelumnya, yang memberikan informasi sejarah dan memudahkan peneliti untuk membandingkan dan menganalisis data yang ada, sehingga memungkinkan terjadinya diskusi yang menarik. Namun dalam tulisan ini, penulis menggunakan beberapa penelitian terdahulu untuk mencari informasi, sehingga memudahkan dalam memperoleh informasi, yang kemudian digali secara mendalam dalam pembahasan untuk mendapatkan penelitian yang menarik. Metode lain yang dapat digunakan untuk analisis data dalam penelitian ini adalah teknik triangulasi dengan sistem analisis data:

a. Reduksi data

Reduksi data meliputi penyaringan data kasar yang berasal dari peneliti lapangan atau penelitian-penelitian sebelumnya untuk memudahkan penulis merangkum dan menganalisisnya, sehingga penulis mempunyai data yang akurat dan relevan untuk disajikan dalam penelitian. Bentuk analisis ini dapat disempurnakan, diklasifikasikan, dan diberi peringkat untuk menghasilkan hasil yang dapat diverifikasi. Informasi kualitatif yang diperoleh dari reduksi ini dapat lebih mudah disederhanakan dan ditransformasikan melalui berbagai cara yaitu seleksi, klasifikasi dan peringkasan, yang memberikan hasil ringkasan dengan pola yang luas

b. Penyajian data

Setelah peneliti mengumpulkan data dan memilih data yang diperoleh, penulis menyajikan data sesuai dengan kebutuhan penelitian, sehingga tidak ada data tambahan yang dapat mempersulit analisis atau bahkan kekurangan data yang menjadikan penelitian kurang penting. akurat karena tidak ada fakta di bidang ini.

c. Matriks kesimpulan

Matriks kesimpulan merupakan ciri umum yang penulis peroleh dari informasi yang diperoleh. Pada tahap ini penulis dapat membandingkan, menggabungkan dan memilih data-data yang mendukung masalah penelitian ini, karena ada beberapa rumusan masalah yang harus diselesaikan, mencari jalan keluar dari permasalahan dalam penelitian ini.